

Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat : Perspektif Ekonomi Islam

Metasari Kartika* | Erni Panca Kurniasih | Nina F. Dosinta | Wahid

Kartika, M., Kurniasih, E. P., Dosinta, N. F., & Wahid. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat : Perspektif Ekonomi Islam. *Wacana Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, 23(1), 59-71

1. Universitas Tanjungpura, Indonesia

Correspondence addressed to:
Metasari Kartika,
Universitas Tanjungpura, Indonesia
Email address:
metasari.kartika@ekonomi.untan.ac.id

Abstract. *The Human Development Index (HDI) is a main factor in determining achievement to help build the quality and welfare of human life in the sense of improving the welfare of the people. Quality human resources are the main capital that is the most basic for the development of a nation. West Kalimantan's HDI is currently ranked as low as 30th. More special review and attention is needed to analyze this. Several factors such as fiscal decentralization, poverty and unemployment can influence human development in West Kalimantan. The aim of this research is to examine and analyze the influence of fiscal decentralization, poverty and unemployment on HDI in West Kalimantan Province. The analysis will also be completed from an Islamic economic perspective in the context of human development. The research method is quantitative using secondary data. The data is then processed using eviews software. The research model was obtained after going through model testing and classical assumption testing. It is hoped that this research can provide another side of the policy approach to increasing HDI from an Islamic economic perspective.*

Keywords: *Fiscal decentralization; unemployment; poverty; human development index*

Pendahuluan

Pembangunan manusia ialah pembangunan yang memiliki sistem atau cara serta mempunyai maksud dan tujuan untuk lebih banyak daripada pilihan, terkhusus dalam hal pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. Pembangunan juga merupakan suatu proses membuat sesuatu baru atau meningkatkan kualitas sesuatu yang sudah ada (Todaro & Smith, 2012).

Pembangunan menurut Perspektif ekonomi Islam juga sebagai peningkatan dan pengembangan kesadaran setiap manusia atas tanggungjawabnya terhadap masalah-masalah dalam keutamaan yang sah, jujur, ikhlas, adil dan berani. Keadilan juga dapat diukur menggunakan 4 hal yaitu kebebasan, keadilan, kebahagiaan, akhlak dan moral. Sumber daya manusia adalah faktor penting dalam pembangunan ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara (Smith & Sharicz, 2011).



This article published by Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Dalam Hal ini, Indonesia khususnya mempunyai tujuan yang tercantumpada Pembukaan Undang- Undang- Dasar 1945 yakni memajukan kesejahteraan umumserta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan memiliki indikator dan paling utama yang diajarkan dalam agama islam. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah ialah memiliki tujuan khusus yaitu *Maqasyid Syariah* demi kesejahteraan umat manusia dan memudahkan kedepannya.

Menurut Ashur (1870) dalam Maqasyid Syariah ialah “Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah SWT yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan- Nya (tidak pada hukum tertentu). Kasdi & Kudus (2014) juga menjelaskan dalam buku Maqasyid Bisns dan Keuangan Islam bahwa ada lima bentuk maqasyid syari'ah yaitu:melindungi agama (Hifdzu Din), melindungi jiwa (Hifdzu Nafs), melindungi pikiran (Hifdzu Aql), melindungi harta (Hifdzu Mal), dan melindungi ketur unan (Hifdzu Nasab). Mereka memberikan penjelasan tentang pentingnya melindungi aspek-aspek tersebut dalam perspektif ekonomi Islam.

Salah satu titik yang menjadi tolak ukur bisa dilihat ialah IndeksPembangunan Manusia (IPM) yakni sebuah faktor utama dalam mengetahui ketercapaian guna membantu untuk membangun kualitas dan kesejahteraan hidup manusia dalam artian mensejahterakan umat. Sumber Daya Manusia yang berkualitas yakni modal utama yang paling dasar pembangunan suatu bangsa. Menurut UNDP (United Nations Development Programme), Indeks Pembangunan Manusia adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara yang menekankan pada peningkatan pilihan bagi masyarakat. Ini mengukur tingkat peningkatan pembangunan melalui angka pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) per kapita dan dipercayai dapat meningkatkan lapangan kerja dan menciptakan peluang ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia menjadi suatu alat yang berguna bagi negara dan pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut BPS, terdapat tiga indikator utama yang membentuk Indeks Pembangunan Manusia, yaitu: Indeks Keanekaragaman Hayati, Indeks Pendidikan, dan Indeks Standar Biodegradable. Gagasan Pembangunan Manusia pertama kali diusulkan oleh PBB dan telah menghasilkan peringkatkinerja pembangunan manusia berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Skala peringkat ini berlangsung dari 0 hingga 100, di mana nilai 0 merupakan kategori pembangunan manusia yang sangat tinggi dengan HDI lebih besar dari 80, kategori tinggi kedua memiliki HDI antara 70 dan 80, kategori sedang memiliki HDI antara 60 dan 70, dan kategori terendah memiliki HDI kurang dari 60. Ini menunjukkan bahwa Indeks PembangunanManusia menjadi alat yang berguna dalam mengukur tingkat pembangunan suatu negara dan membantu pemerintah dalam menentukan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Desentralisasi fiskal yang diwujudkan dalam pengeluaran pemerintah telah dialokasikan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, khususnya dalam mengurangi kemiskinan melalui alokasi pengeluaran yang tepat yang dilaksanakan oleh pemerintah di tingkat yang lebih rendah. Odior (2014) membuktikan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor produktif dapat dapat meningkatkan produk domestik bruto dan mengurangi kemiskinan. Sementara itu, Steiner (2005) menyimpulkan bahwa desentralisasi berdampak pada kemiskinan melalui kebijakan di bidang ekonomi dan politik.

Desentralisasi fiskal merupakan reformasi kebijakan yang penting; sekitar 95% negara berkembang di dunia dunia telah mengadopsi kebijakan ini untuk stabilitas di berbagai sektor. Desentralisasi fiskal secara umum didefinisikan sebagai pengalihan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah subnasional. Hal ini memberdayakan rakyat untuk menjalankan urusan ekonomi, sosial, dan politik sehari-hari dengan bantuan pemerintah daerah. Ada beberapa tujuan yang berbeda dari desentralisasi fiskal desentralisasi fiskal di berbagai negara, seperti peningkatan penyediaan barang dan jasa publik yang penting dan layanan publik yang penting seperti penyediaan pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar, pemberdayaan fiskal masyarakat lokal oleh pemerintah daerah, dan alokasi sumber daya di seluruh wilayah subnasional

(Sasana & Nugroho, 2018).

Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap permasalahan kemiskinan di daerahnya. Desentralisasi fiskal diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan menurunkan tingkat kemiskinan (Miranti, 2013). Menurut Norton (2002) daerah perlu menerapkan tiga hal penting, yaitu pertama, pemerintah daerah harus menyediakan infrastruktur di wilayahnya, seperti infrastruktur jalan. Kedua, persaingan antar pemerintah daerah akan mendorong insentif untuk berinvestasi melalui tingkat pajak yang rendah terhadap investasi. Ketiga, penerimaan pemerintah daerah yang terbatas akan mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menyediakan barang dan jasa publik. Melihat fenomena tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat termasuk yang tertinggi di Kalimantan, maka sudah selayaknya keterlibatan pemerintah dalam kebijakan desentralisasi fiskal sangat diperlukan dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Kalimantan Barat sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Berikut ini data perkembangan APBD pemerintah dan rasio kemandirian fiskal Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tahun 2019 Anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Kalimantan Barat naik sebesar 8,52 persen menjadi Rp. 5.760,66 miliar. Peningkatan anggaran pendapatan ini disebabkan oleh kenaikan pada pendapatan asli daerah (PAD), komponen Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Transfer dari Pemerintah pusat berupa Dana Penyesuaian. Anggaran belanja pada APBD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019 juga meningkat sebesar 8,81 persen menjadi Rp. 5.910,67 miliar. Adapun pos belanja yang mengalami peningkatan pada tahun 2019 adalah belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja modal.

Pengangguran yaitu penduduk rentang usia kerja (15-64 Tahun) yang berusaha untuk mencari kerja, namun belum mendapatkan pekerjaan. Penyebabnya adalah rendahnya tingkat upah serta ketidaksesuaian pada tenaga kerja, mempunyai akses yang terbatas, kekurangan permintaan pelanggan. Pengangguran yakni kualitas total daripada pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja pada pengangguran juga akan bergantung dan mempengaruhi nilai IPM.

Kemiskinan yakni sebuah sekelompok orang yang tidak mampu mempertahankan hak-haknya dan memenuhi kebutuhannya untuk hidup sejahtera (BAPPEDA Provinsi Kalbar, 2004). Kemiskinan juga mengakibatkan kelangkaan kebutuhan ataupun sulitnya mencari pekerjaan dan akses pendidikan (BAPPEDA Provinsi Kalbar, 2012). Maka dapat dinyatakan bahwa kemiskinan dapat juga mempengaruhi nilai IPM.

Kajian Pustaka

Teori Human Capital

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosial ekonomi suatu daerah atau negara, yang mengombinasikan pencapaian dibidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Beberapa negara menganggap Indeks Pembangunan Manusia (HDI) sebagai acuan dalam evaluasi kinerjanya. Oleh karena itu, HDI memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan masyarakat. Menurut Napitupilih, (2007), HDI memainkan peran penting dalam menurunkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. HDI menggunakan indeks gabungan dalam perhitungannya, seperti harapan hidup, tingkat literasi, dan tingkat konsumsiper kapita.

Menurut Kuncoro (2004), Indeks Pembangunan Manusia (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah kombinasi dari tiga indikator, seperti harapan hidup, pengetahuan, dan rasio yang dinilai menggunakan PDB riil. Teori Human Capital menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan pendapatannya dengan meningkatkan tingkat pendidikan mereka. Kuantitas dan

kualitas adalah dua aspek melalui mana seseorang dapat menilai manajemen sumber daya manusia. Kuantitas sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah, sementara kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan hal-hal seperti kecerdasan dan kemampuan fisik (Notoatmodjo, 2009).

Pembangunan Manusia Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut Al-Ghazali yang dikutip oleh Huda et al., (2012), kesejahteraan manusia tergantung pada perlindungan agama, jiwa, pikiran, keturunan, dan kekayaan. Islam mengajarkan bahwa kita tidak boleh membiarkan keturunan kita dalam keadaan lemah, baik dalam hal ekonomi, agama, pengetahuan, maupun pertahanan. Dalam hal ini, Ekonomi Islam me-mainkan peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa kekayaan tidak hanya dicapai melalui pendapatan, tetapi juga melalui perlindungan dan pengembangan jiwa, pikiran, dan keturunan. Ini memastikan bahwa setiap generasi memiliki sumber daya yang baik untuk memastikan kesejahteraan.

Indeks Pembangunan Manusia menurut Islam ialah pembangunan dibangun“at- tanmiyah asy-syumuliyah”. Dalam artian bahwa pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan manusia menganjurkan kita untuk memiliki akhlak baik (*Akhlakul Karimah*). Bertujuan agar mencapai kesejahteraan bagi manusia sekaligus tujuan yang utama yakni maqashid Syari’ah.

Kemiskinan

Menurut Prastyo (2010), seseorang dianggap hidup dalam kemiskinan apabila mereka tidak memiliki sumber daya finansial atau harta benda yang memadai untuk mempertahankan tingkat hidup yang wajar. Kemiskinan secara umum dapat didefinisikan sebagai konsep yang terdiri dari lima kategori, yaitu: 1) Kemiskinan materi, 2) Ketidakberdayaan, 3) Pengangguran, 4) Kemampuan yang lemah untuk mengatasi situasi darurat, 5) Ketergantungan, 6) Keterasingan baik secara geografis maupun sosiologis, dan 7) Isolasi sosial.

Kemiskinan Menurut Perspekti Ekonomi Islam

Al-Ghozali (2011) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam pandangan Islam, kemiskinan dapat membahayakan akhlak, keluarga, dan masyarakat sekitarnya dan memiliki dampak negatif. Mannan (1989) menegaskan bahwa kemiskinan dalam Islam haruslah dilihat sebagai konsep integral antara aspek moral (budaya dan spiritual) dan aspek material

Berdasarkan ilmu fikih, kemiskinan adalah kekurangan dalam hal kebutuhan pokok, pakaian, dan kelangsungan hidup. Agama Islam menganjurkan untuk mengeluarkan zakat atau bersedekah yang akan digunakan untuk kepentingan umat dan masyarakat, terutama bagi orang-orang miskin.

Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik serta menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih demokratis (Siddik, 2002). (Khusaini, 2006) menyatakan desentralisasi fiskal adalah sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang sebelumnya tersentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya diatur atau dilakukan oleh pemerintah. Tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur urusan daerahnya sendiri. Perwujudan dari desentralisasi yaitu dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak, terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepada daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal dapat dibagi menjadi dua luas kategori yaitu otonomi fiskal pemerintah daerah dan pentingnya fiskal pemerintah daerah (Aristovnik, 2012). Otonomi fiskal pemerintah daerah berkaitan dengan transfer fiskal antar pemerintah, pinjaman daerah dan tanggung jawab untuk penyediaan barang dan jasa publik, sedangkan kepentingan fiskal terhubung langsung dengan tingkat tanggung jawab pengeluaran pemerintah daerah terhadap tingkat dari seluruh pengeluaran pemerintah. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *moneys should follow function* merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan, artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut (Yusuf, 2014). Manfaat desentralisasi fiskal, pertama adalah efisiensi ekonomis (Widjayanto, 2013). Anggaran daerah untuk pelayanan publik dapat lebih mudah disesuaikan dengan preferensi masyarakat setempat dengan tingkat akuntabilitas dan kemauan bayar yang tinggi. Manfaat kedua adalah peluang meningkatkan penerimaan pajak dari pajak daerah. Melalui rasio derajat desentralisasi, dapat diketahui kemampuan pemerintah daerah menyelenggarakan desentralisasi dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, yang ditunjukkan dengan kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah (Prakoso, 2017).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, memakai sebuah teknik pengumpulan data berbentuk angka yang akan diolah untuk memperoleh informasi dengan menggunakan aturan analisis data kuantitatif dengan maksud menentukan kerangka konseptual yang sudah dibuat. Menurut Martono (2015, p. 215), penelitian kuantitatif ialah cara atau sistem penelitian dengan menggambarkan sebuah fenomena atau tanda-tanda sosial dengan cara kuantitatif atau menganalisis seperti apa fenomena atau gejala sosial yang sedang terjadi dimasyarakat yang mana satu sama lainnya saling berhubungan.

Kata kunci (key terms) dalam penelitian ini antara lain, Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini fokus pada 14 Kabupaten dan Kota yang tersebar di wilayah Sambas, Pontianak, Landak, Singkawang, Bengkayang, Kubu Raya, Kapuas Hulu, Ketapang, Melawi, Mempawah, Sekadau, Sintang, Kayong Utara, dan Sanggau. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami situasi dan kondisi di wilayah tersebut pada periode 2011 hingga 2022, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari periode tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan dan perubahan yang terjadi di wilayah tersebut dalam jangka waktu 12 tahun. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder. Data ini berasal dari sumber yang tidak langsung, tetapi diberikan oleh pihak yang mengumpulkan data. Variabel yang diteliti adalah tingkat pengangguran, kemiskinan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jenis data yang digunakan adalah *data panel*, yaitu kombinasi dari data time series dan *crosssection*. Sumber data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota Kalimantan Barat. Analisis data akan menggunakan metode analisis data panel dengan pemilihan model terbaik berdasarkan uji Chow, Hausman. Selain itu juga akan dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik dan uji signifikan. Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 DF_{it} + \beta_2 UNEM_{it} + \beta_3 POV_{it} + \varepsilon_{it}$$

Dimana :

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

DF : Desentralisasi Fiskal

UNEM : Pengangguran

POV : Kemiskinan

β_0 : Konstanta

- $\beta_1- \beta_2$: Koefisien
- ϵ : error term
- i : Kabupaten/Kota
- t : Tahun

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistik deskriptif yang menggunakan metode yang memperkirakan kondisi daripada variabel penelitian. Analisis dapat dilihat dengan ketentuan yakni skor minimum, skor maksimum, range atau jangkauan, mean (rata-rata), median, modus, standar deviasi dan tabel distribusi frekuensi. Nilai rata-rata (mean) menggambarkan rata-rata seluruh jumlah data untuk masing-masing variabel. Standar deviasi ialah untuk mengukur tersebarnya data dari nilai rata-rata (mean). Didapat kesimpulan bahwa, jika nilai standar deviasi pada suatu variabel semangkin tinggi, maka bisa diambil kesimpulan semangkin mengumpul pada nilai rata-ratanya, dan sebaliknya jika standar deviasi semangkin rendah maka semangkin menyebar nilai rata-ratanya. Dari hasil analisis deskriptif tersebut bisa diketahui kondisi dari variabel penelitian, apakah kondisi baik, sedang atau buruk dan analisis ini menggunakan data panel yakni (perkiraan antara jumlah kabupaten/kota di Kalimantan Barat dngan periode waktu yaitu 2011-2022) maka, jumlah keseluruhan data didapat sebanyak 168 data observasi untuk analisis deskriptif.

Pemilihan Model Terbaik

Uji Chow

Untuk mengetahui model mana yang lebih baik dalam pengujian data panel, dapat dilakukan dengan penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa intersepnya berbeda dapat diuji dengan uji statistik Chow Test. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode fixed effect lebih baik dari regresi model data panel tanpa variabel dummy (common effect). Hasil perhitungan dari pengujian Chow Test disajikan pada Tabel berikut ini:

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	134.917667	(13,151)	0.0000
Cross-section Chi-square	425.866650	13	0.0000

Gambar 1 Hasil Uji Chow

Dari hasil *Uji Chow* pada Gambar 1 maka, bisa diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak karena dari nilai probabilitas *Cross-Section F* sebesar 0,0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05), yang dapat diartikan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*.

Uji Hausman

Hausman Test ini bertujuan untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*. Hasil dari pengujian dengan menggunakan tes ini ialah mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan metode *Generalized Least Square (random effect model)* lebih baik dari regresi data panel dengan metode *Least Square Dummy Variabel (fixed effect model)*. Hasil perhitungan dari pengujian *Hausman Test* disajikan pada gambar berikut ini:

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	4.992760	3	0.0323

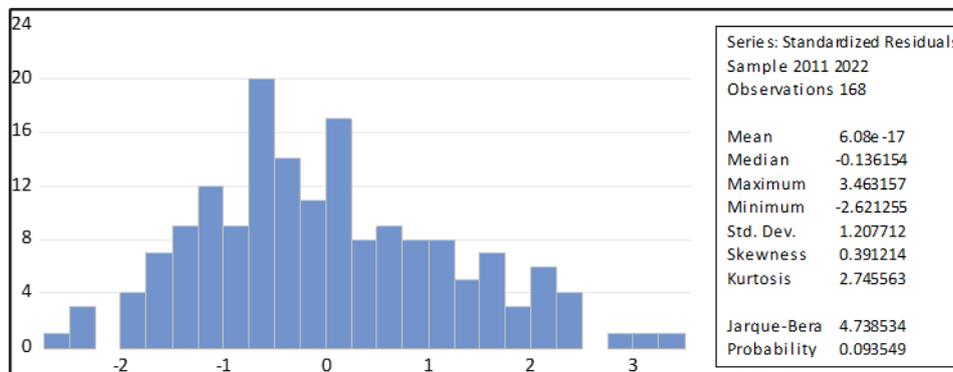
Gambar 2 Hasil Uji Hausman

Dari hasil *Uji Chow* pada Gambar 2 maka, bisa diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak karena dari nilai probabilitas *Cross-Section F* sebesar 0,0323 lebih kecil dari tingkat signifikansi (0,05), yang dapat diartikan bahwa *Fixed Effect Model* lebih baik daripada *Common Effect Model*.

Uji Asumsi Klasik

Normality Test

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah nilai residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Metode Jarque-Bera dapat digunakan untuk menguji normalitas dengan melihat nilai Jarque-Bera dan probabilitas (p-value) yang dihasilkan. Jika nilai Jarque-Bera tinggi dan probabilitasnya juga tinggi, data diasumsikan terdistribusi normal. Namun, jika nilai Jarque-Bera tinggi dan probabilitasnya rendah, data diasumsikan tidak berdistribusi normal (Gujarati & Porter, 2009). Hasil pengujian normalitas dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 3 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil dari Uji Normalitas pada Gambar 3 diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hasil nilai *Jarque Bera* sebesar 4.738534 lebih besar dari taraf signifikansi (0,05), dan nilai probability sebesar 0.093549. Hal tersebut didapat hasilnya residual distribusi normal.

Multicollinearity Test

Menurut Al-Ghozali (2011), pengujian multikolinearitas merupakan teknik yang sangat membantu untuk menentukan derajat korelasi yang ada antara variabel independen suatu model regresi. Model regresi yang digunakan dapat disimpulkan valid jika tidak ada hubungan antar variabel independen. Apabila nilai korelasi masing-masing variabel lebih rendah dari 0,8. Menurut Gozali (2014), belum ada bukti yang mendukung adanya fenomena multikolinearitas.

Tabel 1. Hasil Uji Multikolinieritas

	LOG_DAU	POV	UNEM
LOG_DAU	1.000000	0.641357	-0.119874
POV	0.641357	1.000000	-0.079679
UNEM	-0.119874	-0.079679	1.000000

Pada Tabel 1 dapat diambil hasil bahwasanya model tidak mengandung multikolinieritas

karena korelasi semua variabel bebas lebih kecil dari 0,8.

Heteroscedasticity Test

Uji heterogenitas digunakan untuk mengamati dan melihat perbedaan varians residu dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya (Al-Ghozali, 2011). Jadi, jika varians dari residualnya tetap, maka dapat dikatakan homoskedastis. Dalam penelitian ini digunakan uji White khususnya observasi $Obs \cdot R\text{-Square}$. Jika nilai $exploratory\ chi\text{-square} > 0,05$ maka mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/18/23 Time: 22:18				
Sample: 2011 2022				
Periods included: 12				
Cross-sections included: 14				
Total panel (balanced) observations: 168				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.701983	2.000082	3.850834	0.5480
LOG_DAU	0.419282	0.290442	1.443599	0.2009
POV	-0.244970	0.048206	-5.081731	0.3171
UNEM	0.000413	0.001712	0.240999	0.8099

Gambar 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada Gambar 4 dapat diambil kesimpulan bahwa nilai probabilitas semua variabel lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Signifikan

Pada bagian ini akan dilihat uji signifikansi berdasarkan hasil penggunaan metode fixed effect model untuk memilih model terbaik. Uji signifikansinya akan dilihat dari r square dan uji parsial.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai R² (Koefisien Determinasi) berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin tinggi nilai R², semakin besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dalam analisis regresi dengan model *Fixed Effect*, Berdasarkan hasil pengujian yang menghasilkan nilai R² sebesar 0,922916, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang diteliti yaitu pengangguran dan kemiskinan mampu memberikan penjelasan terhadap variabel terikat yaitu sumber daya manusia. indeks pembangunan sebesar 0,92%. Sedangkan sisanya sebesar 7,81% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model secara *error* (E), atau oleh variabel yang bukan merupakan bagian dari variabel penelitian.

Uji Pengaruh Secara Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana satu variabel independen dapat (secara parsial) menjelaskan variabel dependen. Pengujian secara parsial digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan asumsi faktor lain sama.

Adapun kriterianya yakni :

- 1). Jika Prob. statistik < 0,05, maka variabel independen secara parsial memengaruhi variabel dependen.
- 2). Jika Prob. statistik > 0,05 maka variabel independen secara parsial tidak memengaruhi

variabel dependen.

Pada hasil uji diatas bisa disimpulkan bahwa:

H1 : Desentralisasi Fiskal Terhadap IPM

Nilai prob. t-statistic Desentralisasi Fiskal sebesar $0,0000 < = 0,05$ dan bernilai 14,91150. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa desentralisasi fiskal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap IPM Kalimantan Barat sepanjang periode 2011-2022

H2 : Pengangguran Terhadap IPM

Nilai prob. t-statistic pengangguran sebesar $0,2843 > = 0,05$ dan bernilai -1,074565. Berdasarkan informasi tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pengangguran mempunyai pengaruh negatif dan kecil terhadap IPM Kalimantan Barat sepanjang periode 2011-2022.

H3 : Kemiskinan terhadap IPM

Nilai prob. t-statistic Kemiskinan sebesar $0,0000 < \alpha = 0,05$ dengan nilai t-statistiknya yaitu -4,557654. Sebagaimana hal tersebut, maka kesimpulannya ialah bahwa kemiskinan mempunyai arah hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap IPM Kalimantan Barat periode 2011-2022.

Pembahasan

Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pengujian diatas, diketahui bahwa tingkat signifikan t uji sebesar 0,000 yang menunjukkan angka lebih kecil daripada $\alpha = 0,05$ dengan nilai probabilitas koefisien regresi desentralisasi fiskal sebesar 8.36. Hal ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia, hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2011-2022.

Ketika tingkat kemandirian keuangan suatu daerah yang ditunjukkan dari nilai rasio desentralisasi fiskal suatu daerah meningkat, maka akan mengakibatkan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya yang diukur melalui pencapaian IPM daerah tersebut. Hal ini dikarenakan ketika suatu daerah memiliki kemandirian keuangan daerah yang baik, maka pemerintah daerah tersebut akan mampu untuk mengelola pendapatan daerahnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik, memenuhi kebutuhan publik, menjalankan aktivitas pemerintahan dengan baik, serta membiayai pembangunan daerah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yang diukur dengan pencapaian IPM daerah tersebut. Penerapan sistem pemerintahan terdesentralisasi, akan membuat pemerintah daerah dikejar untuk meningkatkan usahanya dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik di wilayahnya (Suhardjanto, dkk., 2009).

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Pambudi, 2008) pada penelitiannya yang menyatakan tingkat kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dari kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri, dimana tujuan utama dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik lagi di waktu yang akan datang. Serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prakoso, 2017) dalam penelitiannya disebutkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Namun hasil penelitian ini bertolak belakang dengan kajian yang ditulis oleh (Fasrin, 2012), dalam kajiannya disebutkan bahwa desentralisasi fiskal belum dapat menunjukkan

pengaruhnya secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh pengangguran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat.

Hasil dari uji diatas, bahwa pengangguran mempunyai arah hubungan negatif dan berpengaruh tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Kalimantan Barat periode 2011-2022. Dari hasil pengujian diatas, variabel pengangguran mempunyai nilai statistik sebesar (-1.074565) dengan nilai probabilitas sebesar (0.2843) dengan tingkat kepercayaan sebesar 92%. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel pengangguran individu mempunyai pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien pengangguran sebesar (-0,002263), sehingga dapat dipahami bahwa jika jumlah pengangguran berkurang 10 orang maka indeks pembangunan manusia akan berkurang sebesar 0,0226 poin. Hasil penelitian ini sejalan dengan (Sukirno, 2006) yang mengemukakan bahwa dampak negatif pengangguran adalah menurunkan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang yang telah dicapai. Secara teoritis, Indeks Pembangunan Manusia signifikan dan berhubungan negatif atau berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran. Semakin tinggi HDI suatu negara, semakin rendah tingkat penganggurannya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja yang tersedia, dan upaya pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, di negara-negara dengan HDI rendah, tingkat pengangguran cenderung lebih tinggi karena kurangnya kesempatan kerja, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta minimnya investasi dalam pembangunan ekonomi. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Kasnelly & Wardiah, 2021) yang menunjukkan bahwa variabel pengangguran mempunyai pengaruh positif secara parsial dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia dengan probabilitasnya sebesar 0,0570 lebih besar dari alpha (0,05).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berdampak pada tingkat pengangguran. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Ningrum et al., 2020) menunjukkan bahwa sebagian variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2014-2018, yang dinyatakan dengan nilai probabilitas yang kurang dari alpha (0,05) (Ningrum et al., 2020). Penelitian di beberapa daerah di Indonesia juga menunjukan hal yang sama. Di provinsi Banten Mahroji dan Nurkhasanah (2019) menemukan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) mempunyai dampak signifikan dan negatif sebesar 5% terhadap pengangguran, investasi dan upah minimum kabupaten (UMK). Dalam hal ini, pendapatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan pembangunan manusia. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran selama periode 2011-2022 di Kalimantan Barat memberikan dampak terhadap IPM walaupun tidak signifikan.

Pengaruh kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat

Hasil dari uji diatas, bahwa kemiskinan mempunyai arah hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (HDI) Kalimantan Barat periode 2011-2022. Dari hasil uji diatas variabel kemiskinan mempunyai nilai statistik negatif sebesar (-4,557654) dengan nilai probabilitas sebesar (0,0000) dengan tingkat keyakinan sebesar 92%.

Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa variabel kemiskinan individu mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Nilai koefisien kemiskinan sebesar (-0,240872), sehingga dapat dipahami bahwa jika angka kemiskinan turun 10 orang maka indeks pembangunan manusia Kalimantan Barat akan turun sebesar 2,40 poin. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis penelitian bahwa kemiskinan berdampak negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia 2011-2022.

Teori yang memperkuat penelitian ini, menurut [M. Kuncoro et al., \(2010\)](#) yang menyatakan bahwa fokus pembangunan adalah pada peningkatan kualitas manusia. Selain tauhid, Tazkiah an-Nafs dan peran pemerintah, konsep dasar pembangunan ekonomi syariah juga menitikberatkan pada sumber daya manusia. Dapat disimpulkan bahwa kemiskinan mempunyai dampak yang besar terhadap indeks pembangunan manusia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan [Ginting et al., \(2008\)](#) Pembangunan Manusia di Indonesia. Pada penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan koefisien kemiskinan sebesar -0,2410 dengan tingkat kepercayaan signifikan sebesar 99,99 persen. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kemiskinan mempunyai hubungan negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian [Nadila & Muchtolifah \(2022\)](#) yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 dengan signifikansi sebesar (0,965).

Kemiskinan menjadi hambatan untuk meningkatkan mutu SDM dan kesejahteraan karena tolak ukur kemiskinan bukan hanya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, namun dari segi kesehatan pun tidak mampu untuk berobat secara layak karena penghasilan yang terbatas, kemudian dari segi pendidikan juga akan kesulitan untuk menyekolahkan anak-anaknya karena tidak adanya biaya untuk bersekolah. Akibatnya pendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan serta kesehatan yang menurun akan berakibat kemiskinan akan meningkat karena tidak bisa bekerja.

Kemiskinan berhubungan erat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Dimana Fungsi dari pembangunan itu sendiri ialah membangun kualitas dari pada SDM supaya bisa bersaing dengan sumber daya yang lain. Adanya kualitas dari masyarakat itu sendiri, maka sedikit banyaknya pendapatan masyarakat itu meningkat dan dapat mengurangi kemiskinan yang ada. Maka, naik turunnya kemiskinan sangat berkaitan dengan naik turunnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan sebelumnya tentang Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pengangguran, Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Barat : Perspektif Ekonomi Islam, dengan menggunakan regresi data panel pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) disimpulkan Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada indeks pembangunan manusia 2011-2022, Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 2011-2022 dan Kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia 2011-2022.

Untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran Pemerintah Kalimantan Barat dalam hal ini harus merumuskan perencanaan jangka panjang untuk mengembangkan SDM Kalbar, sehingga dalam pengelolaan anggaran akan meminimalkan inefisiensi dalam pemanfaatannya sehingga dana yang terserap tepat sasaran.

Adapun keterbatasan dari penelitian ini yaitu peneliti hanya menggunakan tiga variabel bebas untuk menjelaskan perubahan IPM, oleh karena itu peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian serupa, namun dengan tambahan variabel bebas, variabel pemoderasi atau variabel mediasi yang masih memiliki korelasi dengan IPM.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman, A. (2018). Metodologi Al-Thabari Dalam Tafsir. *Kordinat*, 17. Al-Ghozali. (2011). *Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik*.
- Anto, M. H. (2009). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC

Countries MB. *Islamic Economic Studies*, 19(No.2), 147.

- Ashur, I. (1870). Teori Maqasid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *Notes and Queries*, s4-VI(133), 61–62. <https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengertian IPM*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/8e777ce2d7570ced44197a37/i> ndeks-pembangunan-manusia-2020.html#:~:text=Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan,capaian pembangunan kualitas hidup manusia.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pengertian Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)*. Badan Pusat Statistik. [https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=TPT \(Tingkat Pengangguran Terbuka\) adalah,kurang dari 35 jam seminggu](https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html#:~:text=TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah,kurang dari 35 jam seminggu).
- BAPPEDA Provinsi Kalbar. (2004). *Kemiskinan di Kalimantan Barat*. BAPPEDA Provinsi Kalbar. (2012). *Kemiskinan di Kalimantan Barat*.
- Candrawati, M., Asmara, K., & Hendarti, I. M. (2020). *Dampak Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Sumatera Barat*. 3(2), 46–61.
- Ghozali, I. (2014). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Zifatama.
- Hauzan, A., Yulmardi, Y., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 211–222. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16496>
- Huda, N., Suprayogi, A., Aji, H., Andriyati, R., Aliyadin, A., Arbani, D. M., Utami, R., & Harmoto, T. (2012). *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Kencana Perdana Media Group.
- Indeks Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Barat*. (n.d.). Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/26/30/1/ipm-menurut-kabupaten-kota.html>
- Kemiskinan Menurut Kab/Kota Kalbar*. (n.d.). Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. <https://kalbar.bps.go.id/indicator/23/40/1/kemiskinan-menurut-kab-kota.html>
- Kuncoro, M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang [Regional Autonomy and Development: Reformation, Planning, Strategy, and Opportunity]*. Erlangga.
- Kuncoro, M. P. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Menelitid dan Menulis Tesis?* Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makroekonomi edisi kelima*. Erlangga.
- Martono, N. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika Dengan EVIEWS*. Upp StM YKpN.
- Mashrom, M. Z., Abdullah, M. S. Y., & Gade, S. (2018). *Buku-Al Madinah Al Munnawwarah full.pdf*. Universitas Kebangsaan Malaysia.
- Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. (2017). Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap IPM di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 01(02), 47–54.
- Murtadho, A. (2008). *Solusi Problem Pengangguran Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 180–181.
- Napitupilih, A. S. (2007). *Pengaruh Indikator Komposit Indeks Pembangunan Manusia terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi.
- Ningrum, J. W., Khairunnisa, A. H., & Huda, N. (2020). Pengaruh Kemiskinan , Tingkat Pengangguran , Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014- 2018 dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(02), 212–222.
- Noor, I. (2018). *Pengaruh Upah Minimum Regional, Tingkat Pengangguran dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015 Dari Perspektif Ekonomi Syariah*. 88.
- Notoatmodjo, S. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Gramedia. Prastyo, A. A. (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan*. Undip Press.
- Qardhawi, Y. (1995). *Kiat Islam mengentaskan Kemiskinan*. PT Mizan Pustaka. Smith, P. A. C., & Sharicz, C. (2011). *The Shift Needed For Sustainability*. 18(1), 73–86. <https://doi.org/10.1108/09696471111096019> Sukirno, S. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. LP FE-UI.
- Sumodiningrat, A. (2009). *No Title* IPS dan Pemberdayaan. Gramedia.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota Kalbar*. (n.d.). Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat. <https://>

kalbar.bps.go.id/indicator/6/51/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kab-kota.html

Todaro, & Smith. (2012). *Economic Development*. Pearson.

Zulham, T., Seftarita, C., & Muliza. (2017). Analisis Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, Tingkat Kemiskinan dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(1), 51–69.